

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai Implementasi Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi SIPD RI di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memberikan perubahan dalam tata kelola keuangan daerah. Sebagai aplikasi nasional berbasis digital, SIPD RI berhasil menggantikan sistem sebelumnya (SIPKD) dan kini menjadi satu-satunya sistem yang digunakan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan akuntansi.
2. Penerapan SIPD RI telah meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Hal ini terlihat dari terintegrasinya ketiga modul utama SIPD RI serta meningkatnya kemampuan monitoring keuangan oleh pejabat pengelola dan lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui akses data secara *real time*.
3. Pada proses implementasi SIPD RI masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius seperti kurangnya pemahaman SDM di OPD, keterbatasan teknis dan infrastruktur, ketidakefisienan dalam penerapan sistem *paperless* dan tidak terintegrasi antara SIPD RI dengan sistem *e-payment*, kendala tersebut menjadi indikator bahwa sistem ini masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kesuksesan implementasi SIPD RI. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, antara lain pelatihan bertahap bagi para pengguna sistem, pembentukan *helpdesk internal* untuk memberikan

dukungan teknis, pendampingan intensif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri.

V.2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIPD RI di Kota Depok, beberapa aspek perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh BKD Kota Depok diantaranya

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis yang rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sangat penting mengingat banyak OPD saat ini masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem baru
2. integrasi SIPD RI dengan sistem perbankan daerah, seperti *e-payment* perlu segera diaktifkan kembali. Integrasi ini sebelumnya telah berhasil diterapkan pada sistem lama (SIPKD) dan terbukti mampu mempercepat proses pencairan dana serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Keterbukaan akses terhadap informasi pelaporan keuangan kepada masyarakat merupakan bagian dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Hal ini dapat diimplementasikan melalui penyediaan dashboard publik atau dengan mengintegrasikan SIPD RI ke dalam portal keterbukaan informasi publik yang dapat diakses secara luas. Melalui integrasi tersebut, masyarakat akan memiliki akses langsung untuk memantau dan mengawasi data keuangan daerah secara transparan, sehingga mendorong terciptanya sistem pengawasan eksternal yang lebih kuat.